

**PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS  
PREFERENSI MASYARAKAT PADA KECAMATAN JATI AGUNG SEBAGAI SALAH  
SATU WILAYAH *PERI URBAN* KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Meishara Purnama Sari<sup>1</sup>, Ir. Andi Oetomo, M.Pl.<sup>2</sup>, Helmia Adita Fitra, S.T., M.T.<sup>3</sup>**

Program Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera  
Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan  
Email: [meishara3@gmail.com](mailto:meishara3@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prioritas pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu wilayah *peri urban* Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif, konten, *trendline* dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil studi yang diperoleh 1) kondisi eksisting infrastruktur yang ada saat ini masih tergolong kurang diantaranya belum terdapat infrastruktur transportasi yang melayani wilayah studi, masih kurangnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang belum memenuhi standar yang ada; 2) masih ada rencana pembangunan infrastruktur yang belum terdapat di dokumen baik RTRW ataupun RDTR, sedangkan untuk perkembangan pembangunan infrastruktur dari tahun 2014-2018 diperoleh perkembangan pembangunan infrastruktur tahun 2014 sebesar 21%, 2015 sebesar 28%, 2016 sebesar 14%, 2017 sebesar 21% dan pada tahun 2018 sebesar 14%; 3) Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu wilayah *peri urban* Kota Bandar Lampung diperoleh 3 (tiga) prioritas utama pembangunan infrastruktur yang di prioritaskan masyarakat dengan urutan prioritas nomor 1 (satu) jenis infrastruktur jalan, urutan prioritas ke 2 (dua) yaitu jenis infrastruktur pendidikan, dan 3 (tiga) jenis infrastruktur persampahan. Pada penelitian ini juga di temukan bahwa prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan preferensi masyarakat masih ada yang belum terdapat didalam dokumen rencana dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Prioritas, Pembangunan, Infrastruktur, Wilayah *Peri Urban*, Masyarakat.

**ABSTRACT**

*This research aims to identify the priorities of infrastructure development that became the needs of people in the Jati Agung District as one of the peri urban area of Bandar Lampung City. The methods used are qualitative descriptive, quantitative descriptive, content, trendline and an Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of study obtained 1) existing current condition of existing infrastructure is still relatively lacking there is no transportation infrastructure that serves the area of study, still lack of educational infrastructures and the consciousness that has not fulfilled the existing standards; 2) There is still a plan of infrastructure development that has not been contained in documents either RTRW or RDTR, while for the development of infrastructure development from the year 2014-2018 obtained the development of infrastructures in 2014 by 21%, 2015 by 28%, 2016 by 14%, 2017 by 21% and in the year 2018 by 14%; 3) Priorities of infrastructure development in Jati Agung District as one of the peri urban areas of Bandar Lampung City obtained 3 (three) main priorities of infrastructure development that prioritized the community with the order of number 1 (one) road infrastructure type, the order of priority to 2 (two) namely the type of education infrastructure, and 3 (three) types of waste infrastructure. In this research also found that the priorities of infrastructure development based on the preferences of the community are still not contained in the document plans from the government.*

**Keywords:** *Priorities, Development, Infrastructure, Peri Urban Area, Society*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan perkotaan merupakan perubahan yang dialami oleh daerah perkotaan yang mencakup semua aspek kehidupan baik aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya (Hidayat, 2018). Sebagaimana diprediksi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan bahwa lima milyar orang akan tinggal di perkotaan pada tahun 2030 (SDGs, 2015). Peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan peningkatan kegiatan hal ini membuat kebutuhan ruang untuk permukiman di pusat kota terbatas, sehingga lama-kelamaan daerah tersebut tidak mampu menampung kegiatan penduduknya (Hidayat, 2018). Ketersediaan ruang yang tetap dan terbatas menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan dimana kebutuhan akan ruang meningkat namun ruang yang tersedia terbatas (Hantono, Sidabutar, & Hanafiah, 2018). Ruang yang terbatas mengakibatkan ekspansi ke daerah pinggiran atau wilayah *peri urban* (WPU) yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan ruang daerah perkotaan.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota besar di Indonesia tidak luput dari permasalahan kebutuhan ruang perkotaan. Dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 979.287 sedangkan pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 1.015.910 jiwa yang menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai Kawasan Metropolitan Bandar Lampung. Perkembangan Kota Bandar Lampung sebagai kawasan metropolitan juga berdampak ke daerah pinggiran kota atau WPU. Salah satu WPU Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Jati Agung yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Jati Agung menjadi salah satu daerah yang perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan Kota Bandar Lampung mengingat keberadaannya yang berbatasan langsung. Selain itu perkembangan kecamatan ini juga berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 bahwa Kecamatan Jati Agung di rencanakan sebagai peruntukan kawasan permukiman perkotaan dan juga sebagai pusat pemerintahan provinsi, selain itu keberadaan Gerbang Tol Trans Sumatera dan pembangunan Institut Teknologi Sumatera. Hal ini membuat Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu daerah berpotensi cepat tumbuh.

Mengingat potensi yang dimilikinya jika dilihat dari perkembangan pembangunan infrastruktur

yang ada saat ini masih belum memenuhi standar minimal pelayanan infrastruktur bagi masyarakat. Hal ini bisa di lihat dari perkembangan pembangunan infrastruktur jalan aspal dari tahun 2013-2017 hanya mengalami kenaikan sebesar 4%, sehingga dapat disimpulkan perkembangan pembangunan jalan aspal setiap tahunnya hanya sebesar 1%. Perkembangan pembangunan jalan aspal tergolong tidak signifikan. Pembangunan yang tidak signifikan ini tentunya akan menyebabkan permasalahan dikemudian hari. Sehingga diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk meminimalisir permasalahan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat.

Kebutuhan akan infrastruktur dasar harus dipenuhi untuk kelancaran aktifitas masyarakat. Infrastruktur dasar meliputi transportasi, energi, irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan telekomunikasi. Dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan infrastruktur akan lebih tepat jika dalam perencanaan pembangunan infrastruktur melibatkan masyarakat secara langsung untuk mengetahui prioritas kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana amanat Undang Undang perencanaan dan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pelibatan masyarakat secara aktif tentu akan lebih memaksimalkan hasil dari pembangunan karena masyarakatlah pengguna dari infrastruktur tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan diatas untuk mengentahui prioritas pembangunan infrastruktur maka perlu kiranya dilakukan penelitian terkait penentuan prioritas pembangunan infrastruktur berbasis preferensi masyarakat pada Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu WPU Kota Bandar Lampung.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperjelas data yang diperoleh sehingga dapat di cek ulang dengan hasil deskripsi hasil wawancara dan hasil gambaran kondisi eksisting dilapangan baik data dari observasi maupun data sekunder dari instansi terkait. Adapun metode penilaian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis.

## 2.1 Metode Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner ke masyarakat. Sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur seperti data jumlah infrastruktur eksisting, data jumlah penduduk, sosial ekonomi, serta data terkait kebijakan baik rencana tata ruang kabupaten yang terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya di Kecamatan Jati Agung (RTRW dan RPJMD) dan survei instansional untuk mendapatkan data pendukung seperti penentuan narasumber awal dan data lainnya. Adapun pengumpulan data dilakukan di lima (5) desa yang masuk kedalam WPU Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Desa Way Huwi, Jatimulyo, Karang Anyar, Fajar Baru dan Marga Agung.

## 2.2 Metode Analisis

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif. Analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah dengan mengumpulkan data dari suatu populasi atau sampel populasi yang kemudian data yang di peroleh di analisis (Sugiyono, 2007).

Mengidentifikasi kondisi eksisting infrastruktur Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu wilayah *peri urban* Kota Bandar Lampung menggunakan analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta atau keadaan eksisting kondisi Infrastruktur yang ada di wilayah penelitian dari hasil observasi yang telah dilakukan dan analisis deskriptif kuantitatif untuk membandingkan ketersediaan eksisting infrastruktur dengan standar pelayanan minimal bagi masyarakat.

Mengidentifikasi Rencana dan Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu wilayah *peri urban* Kota Bandar Lampung menggunakan analisis *trendline* digunakan untuk data terkait kebutuhan infrastruktur berdasarkan data *timeseries* yang ada saat ini. Dari data *timeseries* ini nantinya akan dianalisis perkembangan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jati Agung. Dan juga dilakukan analisis konten untuk melihat rencana pembangunan yang akan dilakukan pemerintah baik didalam dokumen rencana tata ruang (RTRW) maupun rencana pembangunan jangka menengah (RJMD), sehingga bisa dilihat arah

pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat diketahui *gap* antara rencana pembangunan infrastruktur dari pemerintah dengan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Analisis prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu wilayah *peri urban* Kota Bandar Lampung menggunakan metode analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) analisis ini digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang diperoleh dari kuesioner yang nantinya akan dibobotkan dan diskoring sehingga didapatkan hasil analisis berupa prioritas pembangunan infrastruktur. Pengolahan data dari kuesioner ini menggunakan *software Expertchoice* agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Selai itu untuk merepresentasikan hasil dari AHP dilakukan analisis statistic deskriptif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Kondisi Eksisting Infrastruktur

Untuk melihat kondisi eksisting infrastruktur di Kecamatan Jati Agung terkhusus di lima desa yaitu Desa Way Huwi, Jatimulyo, Karang Anyar, Marga Agung dan Desa Fajar Baru di lakukan melalui observasi, data sekunder dan juga wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dari analisis ini bisa dilihat kondisi eksisting infrastruktur yang ada di wilayah *peri urban* sehingga dapat membantu analisis kebutuhan infrastruktur. Adapun hasil dari analisis kondisi eksisting adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Kondisi Eksisting Infrastruktur**

Infrastruktur	Eksisting
Jalan	Untuk indikator rasio panjang jalan yaitu 2,45 km/1000 penduduk dan indikator kualitas jalan sudah memenuhi standar dimana kondisi jalan yang dalam kondisi baik lebih besar dibandingkan yang rusak. Sedangkan indikator rasio luas jalan di wilayah studi sebesar 3% dari total luas lahan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ruas jalan di wilayah studi masih kurang dari standar minimal 5% dari luas lahan.
Pendidikan	Masih kurangnya sekolah diantaranya: SD sebanyak 12,

Infrastruktur	Eksisting
	SMP sebanyak 4 dan SMA sebanyak 8, keberadaan sekolah SMA yang terpusat di Desa Jatimulyo sehingga akses untuk sekolah memerlukan biaya yang besar.
Persampahan	Desa yang sudah melakukan pengangkutan sampah baru satu desa yaitu Desa Way Huwi. Sedangkan untuk desa lainnya belum ada pengangkutan maupun pengolahan sampah. Hal ini menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan.
Transportasi	Belum terdapat infrastruktur transportasi
Air Limbah	Terdapat <i>septic tank</i> individu namun belum ada perawatan untuk <i>septic tank</i> , dibutuhkan satu IPLT untuk melayani wilayah studi.
Kesehatan	Masih kurangnya sekolah diantaranya: -Puskesmas Induk: 2 -Puskesmas Pembantu: 2 -Poskesdes: 2 -Posyandu: 15 Masih ada poskesdes yang belum beroperasi karena tidak tersedianya sumber daya manusia.
Telekomunikasi dan Informatika	Belum tersedianya semua jaringan provider <i>Hand Phone</i> , sedangkan jaringan telepon dan internet masih susah diperoleh karena ketersediaan jaringan kabel yang masih kurang.
Ketenagalistrikan	Listrik masih kurang karena devisit energi listrik.
Pengairan	Tidak ada sawah irigasi, pengairan menggunakan air hujan dan sumur bor/gali. Dengan tidak adanya sawah irigasi tentu akan lebih mudah untuk dilakukan alih fungsi lahan sehingga akan mendukung rencana pengembangan Kec. Jati Agung yang memiliki fungsi

Infrastruktur	Eksisting
	sebagai kawasan permukiman perkotaan.
Air Minum	Menggunakan air sumur bor/gali dan air kemasan isi ulang, terdapat PDAM yang melayani Perumahan Pemda di Desa Way Huwi.

Dari tabel diatas terlihat bahwa ketersediaan infrastruktur dasar di wilayah studi masih tergolong kurang dalam penyediaannya hal ini dilihat dari masih banyaknya infrastuktur yang belum memenuhi standar pelayanan minimum yang ada. Berikut beberapa gambar kondisi infrastruktur di wilayah studi:



**Gambar 3. 1 Kondisi Eksisting Jalan**



**Gambar 3. 2 Kondisi Eksisting Infrastruktur Limbah**



**Gambar 3. 3 Kondisi Eksisting Persampahan**

### 3.2 Analisis Rencana dan Perkembangan Pembangunan Infrastruktur

Untuk melihat rencana dan perkembangan pembangunan infrastruktur di wilayah *peri urban* Kota Bandar Lampung maka di lakukan analisis konten untuk menyimpulkan pesan tertentu dari data konteksnya berupa dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta realisasi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di wilayah studi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun berdasarkan dokumen rencana pembangunan baik rencana tata ruang wilayah maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk di wilayah studi dapat disimpulkan untuk realisasi pembangunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 21%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 28%, pada tahun 2016 sebesar 14%, tahun 2017 sebesar 21%, dan pada tahun 2018 sebesar 14%. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Lampung Selatan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 masih banyak rencana yang belum direalisasikan. Dimana realisasi pembangunan pada tahun 2018 hanya sebesar 14% yang berarti jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7%. Perkembangan pembangunan yang terjadi di wilayah studi di dominasi oleh pembangunan jalan baik dari pendanaan pemerintah maupun dari Dana Desa yang dikelola oleh desa.

Didalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 untuk rencana pembangunan infrastruktur yang dilakukan terdiri dari peningkatan dan pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan didalam dokumen RTRW Kabupaten Lampung selatan Tahun 2011-2031 untuk rencana pembangunan infrastruktur terdiri dari infrastruktur pengairan, listrik, jalan dan jembatan, irigasi, telekomunikasi, air minum, air limbah, dan sistem drainase serta infrastruktur persampahan. Dari rencana didalam RPJMD dapat dilihat untuk rencana pembangunan infrastruktur jalan, pengairan, air minum, air limbah dan persampahan belum terdapat didalam dokumen RPJMD. Sedangkan untuk rencana pembangunan infrastruktur yang belum termuat didalam dokumen RTRW adalah rencana pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Masih banyaknya rencana pembangunan yang belum terlaksana tentu harus segera dilakukan pembangunannya. Mengingat potensi cepat tumbuh dari daerah ini dan sudah seharusnya pemenuhan infrasruktur dasar guna mengurangi permasalahan dimasa yang akan datag mengingat fungsi dari daerah ini sendiri di dalam dokumen RTRW Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 diperuntukkan sebagai pengembangan permukiman perkotaan. Pelaksanaan pembangunan tentu harus melibatkan masyarakat dalam penentuan prioritas pembangunan untuk mewakili kebutuhan yang diinginkan masyarakat (Abe, 2002).

### 3.3 Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Analisis AHP dilakukan dengan cara pembobotan kriteria untuk mengukur tingkat kepentingan antar kriteria dan alternatif. Dalam hal ini desa yang menjadi wilayah penelitian terdiri dari Desa Way Huwi, Jatimulyo, Karang Anyar, Fajar Baru, dan Marga Agung. Penilaian dilakukan oleh stakeholder dari setiap desa yang menjadi wilayah penelitian. Untuk memperoleh hasil dilakukan penilaian perbandingan berpasangan setiap kriteria dan alternatif. Kemudian pendapat dari stakeholder ini digabungkan dengan cara rataan geometrik. Selanjutnya dari hasil perhitungan akan diperoleh *eigen vector* dari masing-masing perbandingan berpasangan. Pada penelitian ini untuk hasil perhitungan yang lebih akurat peneliti menggunakan aplikasi *software* Expert Choice. Adapun hasil dari penilaian stakeholder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 3.3.1 Analisis Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Desa Way Huwi

Adapun hasil penilaian dari responden tentang penentuan infrastruktur prioritas diperoleh hasil sebagai berikut.

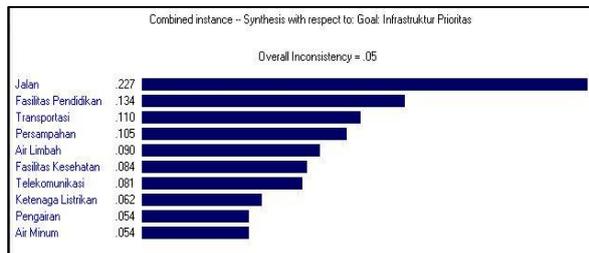


**Gambar 3. 4 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Way Huwi**

Dari gambar diatas bisa dilihat hasil dari input data yang diolah menggunakan *software* Expert Choice 11. Dimana bisa dilihat Overall Inconsistency yang diperoleh yaitu 0,06 yang artinya data bisa digunakan dimana suatu data dianggap konsisten jika memiliki *consistency ratio*  $\leq 0,1$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari penilaian sudah cukup konsisten sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan kembali. Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa alternatif infrastruktur yang di prioritaskan pembangunannya di Desa Way Huwi adalah infrastruktur jalan (alternatif 1) dimana memiliki penilaian paling tinggi dibandingkan alternatif lain yaitu sebesar 20,8%.

Pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan (alternatif 2 dan 3) yang memiliki nilai yang tidak berjauhan yaitu sebesar 12,8% dan 12,1% yang menempati urutan kedua dalam pembangunan infrastruktur di Desa Way Huwi. Dan untuk urutan prioritas lainnya bisa dilihat pada Gambar 3.1.

### 3.3.2 Analisis Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Desa Marga Agung



**Gambar 3. 5 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Marga Agung**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat hasil prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur yaitu jalan dengan bobot nilai sebesar 22,7%. Sedangkan alternatif infrastruktur prioritas kedua yaitu penyediaan dan pembangunan fasilitas pendidikan dengan bobot sebesar 13,4%. Alternatif ketiga yaitu infrastruktur transportasi dengan bobot 11,0%. Untuk urutan detailnya bisa dilihat pada Gambar 3.2.

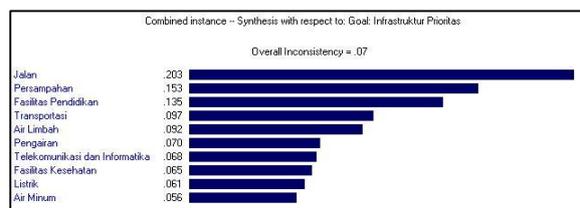
### 3.3.3 Analisis Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Desa Karang Anyar



**Gambar 3. 6 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Karang Anyar**

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa infrastruktur jalan (alternatif 1) dengan nilai 20,6%. Prioritas pembangunan infrastruktur prioritas yaitu infrastruktur persampahan (alternatif 2) dengan nilai bobot sebesar 14,1%. Sedangkan alternaatif ke-tiga yaitu infrastruktur pendidikan dengan bobot sebesar 10,7%.

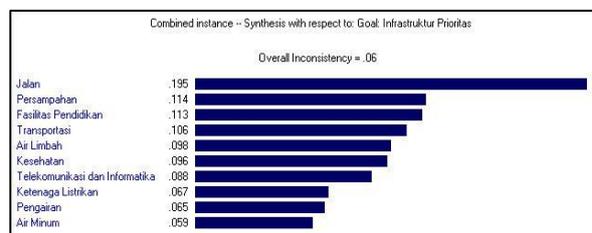
### 3.3.4 Analisis Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Desa Fajar Baru



**Gambar 3. 7 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Fajar Baru**

Dari hasil pembobotan diperoleh infrastruktur prioritas utama yaitu jalan dengan hasil pembobotan sebesar 20,3%. Sedangkan infrastruktur prioritas kedua yaitu infrastruktur persampahan dengan nilai bobot sebesar 15,3%. Prioritas ketiga yaitu infrastruktur pendidikan dengan bobot sebesar 13,5%.

### 3.3.5 Analisis Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Desa Jatimulyo



**Gambar 3. 8 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Jatimulyo**

Adapun infrasruktur yang di prioritaskan pembangunannya pertama menurut responden yaitu infrasruktur jalan dengan nilai bobot sebesar

19,5%. Infrastruktur yang kedua yaitu infrastruktur persampahan dengan bobot sebesar 11,4%. Infrastruktur ketiga yaitu infrastruktur pendidikan dengan bobot 11,3%.

### 3.3.6 Analisis Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu Wilayah Peri Urban Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penggabungan dari kelima desa yang menjadi wilayah studi diperoleh hasil pemeringkatan/pembobotan sebagai berikut.



**Gambar 3. 9 Prioritas Pembangunan Infrastruktur di WPU**

Infrastruktur prioritas berdasarkan penilaian dari responden diperoleh hasil pembobotan yaitu infrastruktur jalan 21,7%, infrastruktur fasilitas pendidikan dengan bobot sebesar 13,4%, infrastruktur persampahan 11,8%, infrastruktur transportasi 9,7% , infrastruktur air limbah 9,3%, fasilitas kesehatan sebesar 8,9%, infrastruktur telekomunikasi dan informatika 7,5%, ketenagalistrikan 6,2%, infrastruktur pengairan sebesar 6,1%, dan infrastruktur air minum 5,5%. Infrastruktur pertama yaitu jalan dengan bobot nilai sebesar 21,7%.

Adapun tiga prioritas utama yaitu: infrastruktur pertama yaitu jalan dengan bobot nilai sebesar 21,7%, sedangkan untuk infrastruktur prioritas yang kedua yaitu fasilitas pendidikan dengan bobot sebesar 13,4% dan yang ketiga yaitu infrastruktur persampahan 11,8%.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan preferensi masyarakat prioritas pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jati Agung sebagai salah satu WPU Kota Bandar Lampung diperoleh tiga prioritas pembangunan infrastruktur utama yang di prioritaskan pembangunannya yaitu infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan dan infrastruktur persampahan. Prioritas pembangunan infrastruktur jalan didasarkan kepada masih belum terpenuhinya indikator panjang jalan

dengan total luas jalan, serta masih banyaknya jalan yang memiliki kondisi jalan yang kurang baik dan diperlukan pembangunannya. Selain itu jalan juga merupakan salah satu infrastruktur dasar yang wajib ada untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan juga dengan adanya infrastruktur jalan akan meningkatkan perekonomian dan kelancaran aktivitas masyarakat. Sedangkan fasilitas pendidikan masih sangat diperlukan pembangunannya karena masih kekurangan baik berupa SD, SMP, dan SMA. Kualitas pendidikan juga menjadi tolak ukur perkembangan suatu daerah. Sedangkan didalam dokumen RTRW Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2031 infrastruktur pendidikan dan kesehatan belum ada. Hal ini tentu akan menyebabkan persoalan dimana pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sementara didalam dokumen RTRW tidak terdapat rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Prioritas pembangunan infrastruktur yang ketiga yaitu infrastruktur persampahan hal ini dikarenakan infrastruktur persampahan masih kurang di wilayah penelitian dan menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan dan tanah kosong. Hal ini juga sesuai dengan kondisi eksisting dilapangan dimana masih banyaknya infrastruktur persampahan yang kurang penyediaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk infrastruktur persampahan berdasarkan preferensi masyarakat belum sejalan dengan analisis teknokratis dimana dalam realisasi pembangunan belum ada pembangunan infrastruktur persampahan yang melayani wilayah penelitian dan juga untuk rencana pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2021 belum ada rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur persampahan. Jika rencana pembangunan dan realisasi pembangunan dilapangan tidak sejalan maka perlu dilakukan peninjauan kembali. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan preferensi masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sehingga infrastruktur yang dibangun sesuai dengan yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini.

## 5. REKOMENDASI

Berdasarkan studi ini dapat diajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam

pembangunan infrastruktur. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dilakukan di WPU adalah peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan.
2. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan diharapkan juga akan dikembangkan infrastruktur transportasi di Kecamatan Jati Agung yang menghubungkan antar desa seperti angkutan desa sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal dikarenakan aksesibilitas dan kendaraan telah tersedia.
3. Alternatif pembangunan fasilitas pendidikan diperlukan karena saat ini fasilitas pendidikan yang ada belum sepenuhnya bisa melayani masyarakat, adapun bentuk dari pembangunan fasilitas pendidikan ini bisa berupa penambahan gedung belajar yang menyebabkan pergantian shif belajar bagi siswa dan penambahan tenaga pengajar.
4. Alternatif pembangunan infrastruktur selanjutnya yaitu infrastruktur persampahan diperlukan karena untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat.
5. Mengingat perbedaan prioritas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dengan prioritas pembangunan pemerintah dalam hal ini berupa (RTRW dan RPJMD) maka harus dilakukan evaluasi terkait dokumen rencana tersebut melalui peninjauan kembali dengan melibatkan masyarakat secara aktif sehingga hasil dari pembangunan infrastruktur sejalan dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Indonesia: Pondok Edukasi.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Kecamatan Jati Agung Dalam Angka 2013*. Kalianda: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Persentase Penduduk Perkotaan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hidayat, O. 2018. "Perkembangan Urban Sprawl Ditinjau dari aspek fisik pada wilayah peri urban kota bandar lampung (studi kasus: Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Jati Agung." Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera, Lampung.
- Hantono, Dedi. Yuanita F.D. Sidabutar dan Ully I.M. Hanfiah. 2018. *Kajian Ruang Publik Kota antara Aktivitas dan Keterbatasan. Langkau Betang*, Vol. 5, page 80-86.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2012. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Lampung Selatan*.
- SDGs. 2015. *Sustainable Cities and Communities. Sustainable Cities and Communities. Kecamatan Jati Agung dalam Angka Tahun 2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2015.
- Kecamatan Jati Agung dalam Angka Tahun 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2016.
- Kecamatan Jati Agung dalam Angka Tahun 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2017.
- Kecamatan Jati Agung dalam Angka Tahun 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2018.
- Kecamatan Jati Agung dalam Angka Tahun 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2019.
- Yunus, H. S. 2008. *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.